

## KERJA SAMA INTERNASIONAL MENGATASI PERUBAHAN IKLIM

7

Humphrey Wangke

### Abstrak

*Banjir besar yang terjadi di China dan India pada 21 dan 23 Juli 2021 serta di beberapa negara lainnya telah meningkatkan kekhawatiran baru tentang dampak perubahan iklim. Ketidapatuhan negara-negara maju dalam kerja sama internasional yang dirancang untuk mengurangi terjadinya perubahan iklim dianggap sebagai penyebabnya. Selama bertahun-tahun, berbagai kerja sama internasional, mulai dari Konferensi Stockholm pada tahun 1972, Konferensi Rio de Janeiro 1992 dan Konferensi Johannesburg 2002, sampai dengan Paris Agreement tahun 2015, menjadi wujud komitmen masyarakat internasional di bidang lingkungan hidup. Terlepas dari keberhasilan membentuk kelembagaan tersebut, upaya kerja sama internasional ini masih harus menghadapi tantangan. Artikel ini secara ringkas menyoroti tantangan ini dan perlunya kerja sama internasional untuk mengatasinya. Kerja sama tingkat regional bisa menjadi solusi untuk mengatasi perubahan iklim mengingat sulitnya mencari kesamaan pandangan pada tingkat yang lebih luas.*

### Pendahuluan

Peristiwa berbahaya yang berasal dari hidrometeorologi terus memicu terjadinya kerusakan dan korban jiwa. Bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim seperti banjir bandang dan kekeringan telah menimbulkan dampak yang luar biasa pada kehidupan manusia. Dunia mencatat, antara tahun 2004 hingga 2014, 83% dari bencana yang terjadi, 39% dari korban kematian, 95% yang tercatat dari total populasi yang terkena dampak, dan 70% dari total kerusakan yang tercatat, semuanya terkait dengan bencana alam yang bersifat hidrometeorologis seperti

cuaca, air, dan iklim (WMO, 2017: 7).

Hujan lebat berhari-hari di China telah menimbulkan banjir luar biasa dan merusak infrastruktur seperti kereta api bawah tanah, bendungan, tepian sungai, dan tanah longsor. Bencana serupa juga terjadi di India dengan meminta korban manusia dan infrastruktur yang sangat besar. Banjir besar yang terjadi pada 21 Juli 2021 di China dan 23 Juli di India menjadi peringatan bagi semua negara di dunia bahwa perubahan iklim telah menjadi ancaman besar bagi kehidupan umat manusia. Saat atmosfer bumi menjadi lebih hangat, maka atmosfer akan menahan lebih banyak uap air yang



membuat hujan lebih deras.

Di Indonesia, bahaya tentang perubahan iklim telah diingatkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang menyatakan perubahan iklim telah menjadi ancaman bagi warga negara di seluruh dunia yang dampaknya sama besarnya dengan pandemi COVID-19 (CNBC News, 29 Juli 2021). Demikian pula dengan Presiden Joko Widodo ketika membuka Rakorbangnas Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang menyatakan bencana geohidrometeorologi di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan, Jakarta dalam waktu 10 tahun lagi akan tenggelam jika bahaya perubahan iklim tidak segera diatasi.

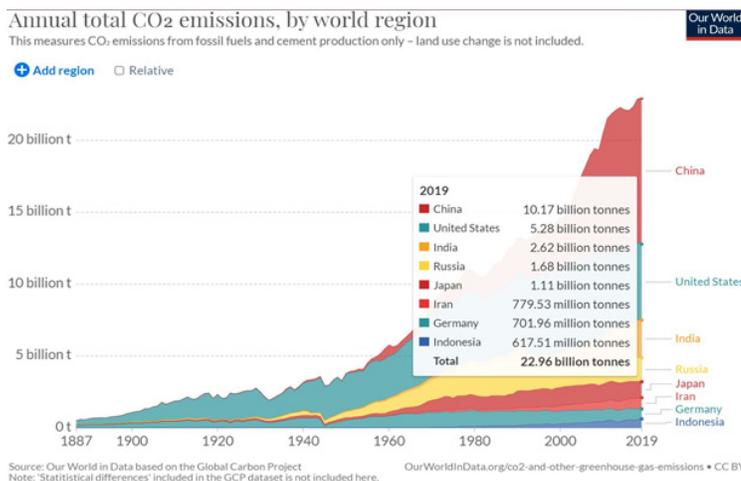
Kendati dunia masih dihantui oleh keganasan COVID-19, namun masalah perubahan iklim jangan lantas diabaikan, apalagi disepelekan. Keduanya sama-sama dapat memicu kematian masal. Ancaman perubahan iklim beriringan dengan pembangunan di suatu negara. Semakin rakyatnya sejahtera, mobilitas semakin tinggi dan penggunaan energi semakin besar. Oleh karena itu, seluruh kegiatan manusia akan menghasilkan emisi karbon yang

akan mengancam dunia dalam bentuk kenaikan suhu. Artikel ini secara ringkas menyoroti tantangan dan perlunya kerja sama internasional untuk mengatasi perubahan iklim.

### Tantangan Perubahan Iklim

Iklim secara sederhana didefinisikan sebagai cuaca suatu daerah yang meliputi suhu, curah hujan, sinar matahari, angin, dan kelembaban. Oleh karena itu, perubahan iklim adalah perubahan cuaca dari waktu ke waktu, baik karena variabilitas alam atau sebagai akibat dari aktivitas manusia. Setelah bertahun-tahun skeptis, realitas perubahan iklim diterima secara global sebagai dampak dari aktivitas pembangunan manusia yang dilakukan selama bertahun-tahun.

Perubahan iklim telah menjadi ancaman yang terus berkembang dan bersifat multidimensional karena banyaknya aktor melalui implementasi sistem energi, transportasi, pertanian, dan penggunaan sumber daya manusia. Karenanya, tanpa disadari dampak perubahan iklim berpotensi menggoyahkan kehidupan manusia pada semua tingkatan.



**Gambar 1. Besaran Emisi CO<sub>2</sub> yang dihasilkan Negara Maju**

Sumber: Our World in Data based on the Global Carbon Project, 2020

Gambar 1 menunjukkan besaran emisi karbon di dunia yang didominasi oleh negara maju. Namun ironisnya, justru negara-negara berkembang yang harus menanggung lebih dari sembilan persepuluh beban perubahan iklim. Beban negara miskin mencakup 98% dari yang terdampak paling serius dan 99% dari kematian akibat bencana terkait cuaca, serta lebih dari 90% dari total kerugian ekonomi.

Laporan yang pernah dikeluarkan oleh Global Humanitarian Forum menyebutkan, bencana hidrometeorologi akan menjadi ancaman terbesar manusia pada tahun-tahun mendatang mengingat pemanasan global telah berdampak pada menghangatnya suhu dan mencairnya es di kutub (GHF, 2009: 7). Laporan itu merupakan bentuk keprihatinan global yang serius terhadap keadilan, sebab orang-orang yang paling menderita akibat perubahan iklim justru mereka yang paling sedikit merusak lingkungan.

Dari sisi keamanan, perubahan iklim tidak secara langsung menyebabkan konflik, tetapi berpotensi menimbulkan ketidakstabilan global akibat kelaparan, kemiskinan, dan pengangguran. Kekurangan makanan dan air bersih, penyakit menular, perselisihan di antara para pengungsi dan bencana alam yang lebih parah akan menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal. Meningkatnya bencana hidrometeorologi secara nyata telah mempengaruhi terjadinya perubahan watak hujan dan cuaca. Tidak hanya polanya, tetapi intensitas, durasi, dan sebarannya juga berubah. Kondisi ini mengakibatkan meningkatkan beban ekonomi bagi masyarakat dan institusi di seluruh dunia.

Seharusnya negara-negara

maju mau berkontribusi memperbaiki lingkungan hidup, karena mereka yang mempunyai andil terbesar atas kerusakan lingkungan dan eksploitasi lingkungan. Semua negara di dunia sudah saatnya melakukan aksi nyata menyelamatkan bumi yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Seluruh negara di dunia sudah saatnya bekerja sama menghindari dampak katastrofe perubahan iklim.

### **Kerja Sama untuk Keadilan**

Dalam tulisan ini kerja sama internasional diartikan sebagai pengaturan kerja sama antarnegara yang dilakukan secara rasional, baik secara individu ataupun kolektif. Dikatakan rasional secara individu karena adanya pilihan untuk menjadi pihak dalam suatu perjanjian bersifat sukarela, sedangkan rasional secara kolektif dimaksudkan jika para diplomat bertemu muka dan memanfaatkan sepenuhnya potensi keuntungan bersama dari kerja sama dalam suatu perjanjian. Kerja sama dalam perjanjian internasional hanya dapat dipertahankan jika semua negara diuntungkan bila menjadi para pihak di dalamnya dan tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan jika tidak menerapkannya.

Dengan pemahaman seperti itu, dalam kerja sama internasional tidak boleh ada *free rider*, dan negara yang terlibat di dalamnya harus patuh pada kesepakatan yang dicapai. Oleh karena itu, kesepakatan harus menentukan strategi apa yang dilakukan para pihak dan dipatuhi. Selain itu, harus ada kepentingan agar para pihak berperilaku sesuai tuntutan strategi. Kerja sama internasional dilakukan tidak hanya oleh negara,

tetapi juga oleh entitas kolektif, seperti perusahaan, partai politik, organisasi etnis, ataupun kepentingan lainnya untuk tujuan yang sama, yaitu memerangi masalah lingkungan global.

Menghadapi bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim, negara-negara maju penghasil emisi karbon terbesar di dunia seharusnya menyadari perlunya bersikap adil dengan menjalankan kerja sama internasional dalam rangka mengatasi perubahan iklim. Mengingat perubahan iklim bersifat lintas negara, maka negara-negara seperti China, India, dan negara-negara di Eropa Tengah yang baru saja mengalami musibah banjir besar sudah saatnya berkolaborasi menghadapi tantangan yang disebabkan oleh perubahan iklim dengan mempromosikan strategi mengatasi perubahan iklim dan mengakhiri penderitaan yang ditimbulkannya.

Perlu kerja sama internasional untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam paradigma pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupinya. Perubahan iklim karena sifatnya lintas batas telah menjadi masalah global yang memerlukan upaya bersama untuk pemecahannya. Oleh karena itu, negara-negara maju perlu memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki lingkungan hidup, sebab mereka yang mempunyai andil terbesar atas kerusakan lingkungan dan eksploitasi lingkungan.

Semua negara di dunia sudah saatnya melakukan aksi nyata dalam menyelamatkan bumi yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan yang tidak ramah

lingkungan. Sebagai anggota G20, Indonesia dapat menginisiasi agar negara-negara anggota G-20 yang memimpin dalam memperkuat kemitraan global untuk merancang strategi dan berkontribusi dalam mengatasi tantangan lingkungan dan iklim global. Melalui sinergi di semua tingkatan, negara-negara G20 dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas lingkungan, dan mengatasi perubahan iklim. Kerja sama tersebut tidak hanya sebatas penurunan emisi, namun yang terpenting adalah penyediaan pendanaan untuk aktivitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang yang paling terdampak.

Di luar negara-negara G20, Indonesia perlu terus mendorong realisasi komitmen negara-negara di dunia untuk mengambil peran lebih dalam pengendalian perubahan iklim. Inisiatif Indonesia sangat penting karena merupakan salah satu negara yang mempunyai posisi paling rentan terdampak perubahan iklim atau pemanasan global bila merujuk pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kerangka Kerja Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*).

Kerja sama internasional dalam menanggulangi dampak perubahan iklim harus terus diupayakan, meskipun tidak ada otoritas dunia yang dapat mendikte sebuah negara tentang apa yang harus dilakukan. Meskipun ada pengadilan internasional, tetapi tidak ada negara yang dapat dipaksa untuk menghadap atau menerima hukuman jika tidak menjalankan kesepakatan internasional. Sebaliknya, negara yang bersedia bekerja sama memecahkan

masalah perubahan iklim tidak mendapatkan insentif apapun.

Implementasi kerja sama internasional dalam penanggulangan perubahan iklim menghadapi tantangan lainnya berupa hubungan antarnegara yang selama ini telah dikondisikan oleh sejarah konflik internasional, bukan sejarah kerja sama internasional. Hal ini membuat kerja sama internasional yang langgeng sangat sulit terbentuk, kecuali ketika kerja sama didorong dan dipertahankan oleh satu negara tunggal yang kuat, atau hegemoni, selama negara itu mau dan mampu melakukannya.

### Penutup

Perubahan iklim merupakan masalah lintas batas negara karena emisi yang dihasilkan sering mempengaruhi negara lain serta lingkungan global. Secara ekonomis, setiap negara pencemar diuntungkan dengan menggunakan lingkungan global sebagai wadah emisi, tetapi pada saat yang sama juga merusak lingkungan global. Oleh karena itu masalah eksternalitas internasional muncul yang hanya dapat diselesaikan dengan kesepakatan sukarela di antara negara-negara berdaulat. Negara-negara maju yang paling banyak merusak lingkungan seharusnya berinisiatif membentuk kerja sama mempercepat pengurangan emisi karbon. Upaya seperti ini dilakukan sebagai bentuk keadilan mereka terhadap negara berkembang yang merasakan dampak perubahan iklim lebih parah lagi. Sebagai negara yang juga terdampak dan sekaligus anggota G20, Indonesia dapat menginisiasi negara-negara G20 untuk memulai pengurangan emisi karbon.

### Referensi

- Barrett, Scott. 2015. "A Theory of Full International Cooperation", dalam Carlo Carraro (ed.), *Climate Change and Sustainable Development*. FEEM, Milan.
- Carraro, Carlo and Siniscalco, Domenico. 2015. "Strategies for the International Protection of the Environment", dalam Carlo Carraro (ed.), *Climate Change and Sustainable Development*. FEEM, Milan.
- Global Humanitarian Forum. 2009. *The Anatomy of a Silent Crisis*. Geneve.
- "Indonesia Green Summit 2021: Komitmen Capai Netral Karbon 2060", *Media Indonesia*, 28 Juli 2021, hal. 3.
- Kurniawan, Edison. "Perubahan Iklim dan Redefinisi Sistem Pertahanan Keamanan", *Media Indonesia*, 28 Juli 2021, hal. 6.
- O'Neill, Kate; Balsiger, Jorg; and Van Deveer, Stacy D. 2004. "Actors, Norms, and Impact: Recent International Cooperation Theory and the Influence of the Agent-Structure Debate", *Annual Review of Political Science*, 7:149-75.
- "Pembangunan Berkelanjutan Demi Keselamatan Bersama", *Media Indonesia*, 2 Agustus 2021, hal. A1.
- "RI Minta Akses Pendanaan Iklim Dipermudah", *Investor Daily*, 31 Juli 2021, hal. 7.
- "RI needs \$312b for carbon pledge: Minister", *The Jakarta Post*, 31 Juli 2021, hal. 5.
- "Sinergi untuk Netral Karbon", *Media Indonesia*, 27 Juli 2021, hal. 1.
- Waspada Katastrophe Perubahan Iklim, *Bisnis Indonesia*, 31 Juli 2021, hal. 2.
- Wells, Barbara. "Protecting plants will protect people", *The Jakarta Post*, 27 Juli 2021, hal. 7.

World Meteorological Organization,  
"A Disaster Risk Reduction  
Roadmap for World  
Meteorological Organization",  
WMO, 31 Maret 2017.



Humphrey Wangke  
[humphrey.wangke@dpr.go.id](mailto:humphrey.wangke@dpr.go.id)

Dr. Humphrey Wangke, M.Si. Menyelesaikan Pendidikan S1 Hubungan Internasional tahun 1988 di FISIP Universitas Jember dan pendidikan S2 tahun 1998 pada Program Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia. Pada tahun 2018 menyelesaikan studi S3 di Sekolah Ilmu Lingkungan (SIL) Universitas Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Utama Kepakaran Isu-Isu politik Strategis Pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa Karya tulis yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: "Diplomasi Indonesia dan Pembangunan Konektivitas Maritim (2018)", "Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan (2017)", "Solving the Problem of Illegal Logging through the Implementation of the Model of Partnership Between Balai TNK and the Local Community (The Case Study of Illegal Logging in TNK, East Kalimantan (2017)", "The Management of Kutai National Park through the Multi-stakeholder Partnership (2017)".

#### **Info Singkat**

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.*